

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Jumat, 12 Maret 2020



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia Halaman 21	Jumat, 13 Maret 2020	ATI Khawatir Dampak Buruk Iklim Investasi	Asosiasi Jalan Tol Indonesia menilai bahwa penundaan penyesuaian tarif jalan tol oleh pemerintah bisa berdampak buruk pada iklim investasi. Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Krist Ade Sudiyono mengatakan bahwa penundaan tarif adalah gangguan kontraproduktif yang harus dihindari. "Dari pengalaman yang ada, isu ini sangat sensitif bagi para investor luar negeri. Apalagi, saat ini bisnis jalan tol sudah mengarah menjadi industri infrastruktur yang menjadi tujuan investasi," Katanya Kepala Bisnis, Kamis (12/3).
2	Bisnis Indonesia Halaman 21	Jumat, 13 Maret 2020	PUPR Belum Alokasikan Dana Pembangunan Fisik	Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga mengatakan bahwa belum adanya anggaran khusus terkait dengan pekerjaan konstruksi fisik lantaran masih menunggu terbitnya Undang – Undang Ibu Kota Negara (IKN). Padahal, pemancangan tiang perdana (groundbreaking) rencananya dilakukan pada Oktober 2020. "Groundbreaking itu baru mengawali [pembangunan fisik tahap pertama]. Terkait dengan biaya, hingga saat ini Kementerian PUPR belum mengalokasikan biaya [konstruksi] fisik karena masih menunggu aspek regulasi [UU IKN]." Katanya, Kamis (12/3). Danis menambahkan bahwa jika dalam perkembangannya memang dibutuhkan uang muka pada proses awal pembangunan fisik, PUPR siap merevisi anggaran kementerian yang ada.
3	Koran Tempo Halaman 3-5	Jumat, 13 Maret 2020	Desain Ibu Kota Baru Selesai pada Pertengahan 2020	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa desain dasar dari kawasan ibu kota negara (IKN) baru akan selesai pada pertengahan 2020. Direktur Jenderal Cipta Karya Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan bahwa berbagai pemenang dari sayembara konsepnya akan dikolaborasikan untuk melakukan finalisasi desain urban IKN. Finalisasi desain urban IKN dijadwalkan pada periode Januari – Juli 2020. Rancangan akan memenuhi sejumlah kriteria. Yaitu mencerminkan identitas bangsa, menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi lingkungan, serta mewujudkan kota yang cerdas, modern, dan berstandar internasional.

4	Media Indonesia Halaman 13	Jumat, 13 Maret 2020	Ibu Kota Baru Mulai Dibangun Oktober	Direktur Jenderal Cipta karya kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan groundbreaking pembangunan desain ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur akan dilakukan pada semester II 2020, yakni Oktober atau November nanti, Rencana pembangunan infrastruktur dilakukan setelah finalisasi urban design IKN yang dijadwalkan pada periode Januari – Juli 2020. “Groundbreaking diperkirakan pada semester II 2020,” ungkap Danis do Kantor Kementerian PU-Pera, Jakarta, kemarin.
---	-------------------------------	-------------------------	--	--

Judul	ATI Khawatir Dampak Buruk Iklim Investasi	Tanggal	Jumat, 13 Maret 2020
Media	Bisnis Indonesia Halaman 21		
Resume	Asosiasi Jalan Tol Indonesia menilai bahwa penundaan penyesuaian tarif jalan tol oleh pemerintah bisa berdampak buruk pada iklim investasi. Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Krist Ade Suidiyono mengatakan bahwa penundaan tarif adalah gangguan kontraproduktif yang harus dihindari. "Dari pengalaman yang ada, isu ini sangat sensitif bagi para investor luar negeri. Apalagi, saat ini bisnis jalan tol sudah mengarah menjadi industri infrastruktur yang menjadi tujuan investasi,"Katanya Kepala Bisnis, Kamis (12/3).		

| PENUNDAAN PENYESUAIAN TARIF TOL |

ATI Khawatir Dampak Buruk Iklim Investasi

Bisnis, JAKARTA — Asosiasi Jalan Tol Indonesia menilai bahwa penundaan penyesuaian tarif jalan tol oleh pemerintah bisa berdampak buruk pada iklim investasi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Krist Ade Suidiyono mengatakan bahwa penundaan tarif adalah gangguan kontraproduktif yang harus dihindari.

"Dari pengalaman yang ada, isu ini sangat sensitif bagi para pelaku usaha, apalagi para investor luar negeri. Apalagi, saat ini bisnis jalan tol sudah mengarah menjadi industri infrastruktur yang menjadi tujuan investasi," katanya kepada *Bisnis*, Kamis (12/3).

Ade dimintai komentarnya berkaitan dengan keputusan

pemerintah menunda penyesuaian tarif tiga ruas tol karena alasan daya beli masyarakat yang menurun serta menjaga kepercayaan investor.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit mengungkapkan bahwa dari Surat Keterangan Penyesuaian Tarif 2019, terdapat tiga ruas tol yang mengalami penundaan tarif yaitu ruas Palimanan—Kanci, Belawan—Medan—Tanjung Morawa, dan Surabaya—Gempol. Pemilik tiga ruas tol tersebut adalah PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Berdasarkan data BPJT, ketiga ruas ini sebelumnya dijadwalkan memperoleh penyesuaian tarif pada 30 November 2019.

Kendati begitu, badan usaha

jalan tol memiliki hak untuk mengajukan kompensasi akibat penundaan penyesuaian tarif tersebut.

Menurut Ade, ada dua sisi yang dikorbankan oleh disrupsi kontraproduktif ini. *Pertama*, investasi langsung di proyek infrastruktur yang digiatkan pemerintah sehingga ketidakkonsistenan terhadap kesepakatan yang dipertjanjikan adalah kampanye buruk yang memengaruhi risiko ketidakpastian usaha di Indonesia.

Kedua, alternatif pembiayaan proyek, diversifikasi instrumen investasi atau alternatif pembiayaan yang mulai beragam dan mulai diminati oleh investor domestik maupun asing akan ikut terpengaruh. (*Aprianus Doni T.*)

Judul	PUPR Belum Alokasikan Dana Pembangunan Fisik	Tanggal	Jumat, 13 Maret 2020
Media	Bisnis Indonesia Halaman 21		
Resume	Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga mengatakan bahwa belum adanya anggaran khusus terkait dengan pekerjaan konstruksi fisik lantaran masih menunggu terbitnya Undang – Undang Ibu Kota Negara (IKN). Padahal, pemancangan tiang perdana (groundbreaking) rencananya dilakukan pada Oktober 2020. “Groundbreaking itu baru mengawali [pembangunan fisik tahap pertama]. Terkait dengan biaya, hingga saat ini Kementerian PUPR belum mengalokasikan biaya [konstruksi] fisik karena masih menunggu aspek regulasi [UU IKN].”katanya, Kamis (12/3). Danis menambahkan bahwa jika dalam perkembangannya memang dibutuhkan uang muka pada proses awal pembangunan fisik, PUPR siap merevisi anggaran kementerian yang ada.		

| IBU KOTA NEGARA |

PUPR BELUM ALOKASIKAN DANA PEMBANGUNAN FISIK

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum mengalokasikan anggaran pembangunan fisik ibu kota negara. Namun, jika diperlukan, kementerian itu siap merevisi anggaran yang ada guna menalangi kebutuhan dana pada awal pembangunan fisik.

Aprianus Dani T.
aprianus.dani@bisnis.com

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga mengatakan bahwa belum adanya anggaran khusus terkait dengan pekerjaan konstruksi fisik lantaran masih menunggu terbitnya Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN). Padahal, pemancangan tiang perdana (*groundbreaking*) rencananya dilakukan pada Oktober 2020.

“*Groundbreaking* itu baru mengawali [pembangunan fisik tahap pertama]. Terkait dengan biaya, hingga saat ini Kementerian PUPR belum mengalokasikan biaya [konstruksi] fisik karena masih menunggu aspek regulasi [UU IKN],” katanya, Kamis (12/3).

Danis menambahkan bahwa jika dalam perkembangannya memang dibutuhkan uang muka pada proses awal pembangunan fisik, PUPR siap merevisi anggaran kementerian yang ada.

“Misalnya, untuk tahap awal dibutuhkan uang muka saja ya, mungkin tidak terlalu besar bisa sekitar Rp200 miliar—Rp300 miliar, saya kira dimungkinkan dari, misalnya, kita melakukan revisi anggaran PUPR yang ada,” katanya.

Lebih lanjut, katanya, dalam pembangunan tahap pertama atau hingga 2024 akan dibangun infrastruktur jalan dan jembatan, perumahan, dan permukiman.

Beberapa waktu lalu, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharto Monoarfa mengemukakan bahwa sudah banyak investor asing yang menawarkan diri untuk ikut dalam proyek pembangunan IKN. Mereka berasal dari Amerika Serikat, Jerman, Singapura, Denmark, Italia, Uni

Emirat Arab, Inggris, dan China. Namun, pemerintah yang mewakili para investor asing tersebut baru sebatas mengutarakan minat dan belum memaparkan konsep detail kepada Indonesia.

Pemerintah juga masih mempelajari berbagai skema kerja sama yang ditawarkan, khususnya dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta investasi langsung.

Investasi berskema KPBU dan swasta ditargetkan menjadi sumber utama untuk membiayai pembangunan IKN yang membutuhkan dana Rp466 triliun.

SUMBER DANA

Berdasarkan data Bappenas, pemerintah memetakan tiga sumber dana untuk membiayai IKN, yaitu Rp89,40 triliun dari APBN, Rp253,40 triliun dari skema KPBU, dan Rp123,20 triliun dari investasi swasta, BUMN, dan BUMD.

Jenis sumber pembiayaan yang bisa digunakan, yaitu ekuitas (penanaman modal asing/dalam negeri, investor pasar modal), pinjaman (perbankan asing/dalam negeri), dan obligasi korporasi (investor pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan reksadana).

Dana dari APBN digunakan untuk membangun fasilitas pemerintahan primer, antara lain istana negara, gedung legislatif dan yudikatif, bangunan untuk TNI/Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer.

Adapun, investasi skema KPBU akan membiayai infrastruktur dasar (air minum dan sanitasi), rumah dinas ASN/TNI/Polri, pembangunan

infrastruktur utama, transportasi berbasis rel, sarana pendidikan dan kesehatan, serta pemasyarakatan. Terakhir, alokasi investasi langsung dari swasta, BUMN, dan BUMD dimanfaatkan untuk membangun perumahan umum, perguruan tinggi, *science-technopark*, sarana kesehatan swasta, dan pusat perbelanjaan.

Sebelumnya, Danis menyatakan bahwa kementerian itu akan memulai pembangunan infrastruktur dasar untuk IKN pada akhir tahun ini. “Insyaallah ada *groundbreaking* infrastruktur dasar pada Q4 [kuartal keempat] atau akhir semester kedua Tahun Anggaran 2020. [Infrastruktur dasar tersebut yaitu] jalan akses, waduk, air bersih,” katanya. (Bisnis, 3 Maret).

Saat ini, katanya, Kementerian PUPR menyiapkan rencana desain dan hitungan terkait dengan proyek infrastruktur dasar yang akan dikerjakan tersebut. □



Groundbreaking itu baru mengawali [pembangunan fisik tahap pertama].

Tahapan Awal Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Kawasan IKN (2019–2024)

SUMBER DAYA AIR

- Sept. 2019–Apr. 2020: Desain dasar
- Feb. 2020–2024: Konsultan manajemen konstruksi
- 2020–2023: Desain dan bangun
- Mei 2020–2021: Survei, investigasi dan desain Pengendali banjir, drainase, dan air baku
- 2021–2022: Konstruksi pengendali banjir dan drainase utama
- 2021–2023: Konstruksi penyediaan air baku

JALAN & JEMBATAN

- Sept. 2019–Apr. 2020: Persiapan tender (survei, kriteria desain, dan penyusunan desain)
- Mei–Des. 2020: Pelaksanaan tender
- 2021–2024: Konstruksi

PERUMAHAN & PERMUKIMAN

- 2020–2021: Penyusunan desain dasar dan *detail engineering design* perumahan
- 2022–2024: Pembangunan perumahan
- 2019–2020: Survei, penyusunan desain dasar, dan persiapan KPBU untuk pembangunan untuk sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan sampah, dan sistem pemadam kebakaran
- 2021–2024: Pembangunan infrastruktur permukiman

Sumber: Satgas PPI IKN, 2 Januari 2020

Tahapan pembangunan Ibu Kota Baru

- 2021–2024**
Pembangunan istana, kantor lembaga negara yang terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif, selain itu juga taman budaya dan botanikal garden.
- 2025–2029**
Pembangunan perumahan ASN, TNI, dan Polri. Lalu fasilitas pendidikan, *diplomatic compound*, *hightech and clean industries*, R&D Center, MICE Convention Center, Sport Center, Museum, Shopping Mall, dan Pangkalan Militer.
- 2030–2045**
Pembangunan tahap akhir dilengkapi nasional park, konservasi orang utan, klaster permukiman non-ASN, metropolitan, dan wilayah pengembangan terkait dengan wilayah provinsi sekitarnya.

Kebutuhan Biaya Pembangunan Ibu Kota Baru*

Kebutuhan Infrastruktur	Biaya (Rp triliun)
Fungsi utama: Gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif	51,10
Fungsi pendukung: Gedung dan rumah ASN/Polri/TNI, fasilitas pendidikan dan kesehatan	233,70
Fungsi Penunjang: Fasilitas sarana dan prasarana**	173,20
Kebutuhan Pengadaan Lahan	8
Total	466

Ket. *) Belum termasuk biaya lain, seperti biaya operasional pemerintahan selama masa konstruksi, biaya operasional pemerintahan selama masa transit.

**) Sarana dan prasarana meliputi antara lain jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolahan limbah, sarana olahraga, ruang terbuka hijau.

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas/Cipta Karya/PUPR)

BISNIS/AYAN INDRAYANA

Pemerintah sudah mencanangkan pemindahan ibu kota baru yang lokasinya dipastikan di Kalimantan. Proses pembangunan ibu kota baru yang berbasis Forest City tersebut butuh tiga tahapan dengan periode 2021 hingga 2045.



Ibu Kota Baru Berbasis Forest City

Judul	Desain Ibu Kota Baru Selesai pada Pertengahan 2020	Tanggal	Jumat, 13 Maret 2020
Media	Koran Tempo Halaman 3-5		
Resume	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa desain dasar dari kawasan ibu kota negara (IKN) baru akan selesai pada pertengahan 2020. Direktur Jenderal Cipta Karya Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan bahwa berbagai pemenang dari sayembara konsepnya akan dikolaborasikan untuk melakukan finalisasi desain urban IKN. Finalisasi desain urban IKN dijadwalkan pada periode Januari – Juli 2020. Rancangan akan memenuhi sejumlah kriteria. Yaitu mencerminkan identitas bangsa, menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi lingkungan, serta mewujudkan kota yang cerdas, modern, dan berstandar internasional.		

PERISTIWA

Desain Ibu Kota Baru Selesai pada Pertengahan 2020

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa desain dasar dari kawasan ibu kota negara (IKN) baru akan selesai pada pertengahan 2020.

EDISI 13 MARET 2020



JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa desain dasar dari kawasan ibu kota negara (IKN) baru akan selesai pada pertengahan 2020. Direktur Jenderal Cipta Karya Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan bahwa berbagai pemenang dari sayembara konsepnya akan dikolaborasikan untuk melakukan finalisasi desain urban IKN.

Finalisasi desain urban IKN dijadwalkan pada periode Januari-Juli 2020. Rancangan akan memenuhi sejumlah kriteria, yaitu mencerminkan identitas bangsa, menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi lingkungan, serta mewujudkan kota yang cerdas, modern, dan berstandar internasional.



Dalam IKN tersebut akan terdapat tiga zona, yaitu kawasan inti pusat dengan luas 5.644 hektare, kawasan ibu kota negara seluas 56.180 hektare, serta kawasan perluasan IKN yang mencapai sekitar 256 ribu hektare. Kementerian membentuk tim yang bertugas melakukan finalisasi urban desain pemenang sayembara Gagasan Desain Ibu Kota Negara. "Kami targetkan akan selesai pada pertengahan tahun, yaitu Mei atau Juli 2020, untuk disampaikan ke Presiden," ujarnya kemarin.

Danis berharap pada sekitar akhir semester II 2020 sudah dilakukan groundbreaking IKN.

Pembangunan IKN akan terbagi dalam beberapa periode. Periode secara keseluruhan 2019-2021 antara lain perancangan kawasan penyusunan desain urban, 2020-2023 perencanaan teknis dan pembangunan infrastruktur PUPR, 2020-2024 sayembara dan pembangunan Istana Presiden, Wapres, Kompleks MPR/DPR/DPD, dan perkantoran kementerian/lembaga. Kemudian proses pemindahan IKN akan dilakukan secara bertahap, yaitu mulai 2024 hingga 2045 mendatang.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Siapkan Keringanan Kredit bagi Usaha Kecil

Investasi 53 Smelter Butuh US\$ 24,4 Miliar

Desain Ibu Kota Baru Selesai pada Pertengahan 2020

Iran Akan Kirim Kotak Hitam ke Kiev

Serangan Geng di Papua Nugini, 10 Orang Tewas

BERITA TERPOPULER

by @Dahlan

Belum Satu Suara - Cover Story

KPPOD: Pembangunan di Papua Tidak Terintegrasi - Nasional

Jam tangan baru diluncurkan, diskon 90% hanya hari ini.

Crucio Rollator

Silang Kabar Korban Pertama - Laporan Utama

Pemerintah Bebaskan Pajak Penghasilan Masyarakat Selama Enam Bulan - Peristiwa

Judul	Ibu Kota Baru Mulai Dibangun Oktober	Tanggal	Jumat, 13 Maret 2020
Media	Media Indonesia Halaman 13		
Resume	Direktur Jenderal Cipta karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan groundbreaking pembangunan desain ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur akan dilakukan pada semester II 2020, yakni Oktober atau November nanti, Rencana pembangunan infrastruktur dilakukan setelah finalisasi urban design IKN yang dijadwalkan pada periode Januari – Juli 2020. “Groundbreaking diperkirakan pada semester II 2020,” ungkap Danis di Kantor Kementerian PU-Pera, Jakarta, kemarin.		

Ibu Kota Baru Mulai Dibangun Oktober

DIREKTUR Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan *groundbreaking* pembangunan desain ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur akan dilakukan pada semester II 2020, yakni Oktober atau November nanti.

Rencana pembangunan infrastruktur dilakukan setelah finalisasi *urban design* IKN yang dijadwalkan pada periode Januari-Juli 2020.

“*Groundbreaking* diperkirakan pada semester II 2020,” ungkap Danis di Kantor Kementerian PU-Pera,

Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Kementerian PU-Pera telah melakukan sayembara gagasan desain kawasan IKN yang melibatkan masyarakat umum.

Dari konsep yang ditawarkan tiga pemenang terbaik, yakni Negara Rimba Nusa, The Infinite City, dan Kota Seribu Galur, Kementerian PU-Pera menggabungkan konsep ketiganya untuk membangun kawasan dengan visi sebagai katalis peningkatan peradaban manusia Indonesia.

“Visi konsep desain IKN mengacu pada tiga poin, yakni mencerminkan iden-

titas bangsa, menjamin keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta mewujudkan kota yang cerdas, modern bertaraf internasional,” lanjutnya.

Dalam IKN tersebut akan terdapat tiga zona, yaitu kawasan inti pusat dengan luas 5.644 hektare, kawasan ibu kota negara sebesar 56.180 hektare, serta kawasan perluasan IKN yang mencapai sekitar 256.000 hektare.

Kementerian akan menyempurnakan detail konsep desain yang diperkirakan rampung Mei nanti. Setelah itu, konsep akan diajukan ke pemerintah dan

menunggu hasil rancangan undang-undang (RUU) yang disahkan DPR.

Danis mengatakan, yang jadi fokus utama pembangunan pertama ialah bendungan, jalan, dan drainase. “Setelah *groundbreaking*, jumlah dana yang dibutuhkan tahap awal tidak banyak, DP (*down payment*) cukup sekitar Rp200 miliar-Rp300 miliar.”

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyatakan pemindahan ibu kota negara akan tetap sesuai rencana meski ada wabah covid-19. (Wan/Ant/E-3)